

**DIKTAT  
PENGEMBANGAN KURIKULUM I**

**I PUTU WIDYANTO**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG  
PALANGKA RAYA**

**2015**

## DAFTAR ISI

MATERI 1 EVALUASI KURIKULUM.....	1
MATERI 2 PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	20
MATERI 3 KONSEP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	25
MATERI 4 PRINSIP MANAJEMEN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM....	30
MATERI 5 MANAJEMEN PERENCANAAN KURIKULUM .....	32
MATERI 6 MANAJEMEN PELAKSANAAN KURIKULUM .....	38
MATERI 7 MANAJEMEN PEMANTAUAN KURIKULUM .....	41
MATERI 8 MANAJEMEN PENILAIAN KURIKULUM .....	45
MATERI 9 TELAAH KURIKULUM KTSP.....	48
LAMPIRAN	

# **MATERI 1**

## **EVALUASI KURIKULUM**

### **PENGERTIAN EVALUASI KURIKULUM**

Keberadaan evaluasi kurikulum menjadi hal yang penting adanya. Adapun pengertian evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria (Purwanto, 2009 : 1). Evaluasi juga diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu (Sudijono, 2003:5). Sedangkan menurut Marrison evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat criteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan (Hamalik, 2005: 2007:253).

Penggunaan istilah evaluasi sering terjadi salah pengertian dengan beberapa istilah berikut; pengukuran (measurement), assessment dan penilaian. Masing-masing istilah tersebut berbeda makna dan pengertian tetapi saling terkait. Pengukuran adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek atau gejala, assessment adalah kegiatan mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi mengenai perilaku belajar siswa untuk keperluan penempatan dan pembelajaran. Evaluasi adalah kegiatan membuat penilaian atau keputusan berdasarkan pengukuran atau assessment dan penilaian adalah kegiatan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Evaluasi pada dasarnya adalah penyediaan informasi untuk memperlancar proses pengambilan keputusan pada beberapa tingkat pengembangan kurikulum. Informasi ini mungkin berguna bagi program pembelajaran secara keseluruhan.

Evaluasi merupakan perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggung jawabkan. Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat penilaian apakah suatu kompetensi telah dicapai. Evaluasi juga dimaksudkan apakah siswa dapat melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan standart kemampuan yang ditetapkan. Evaluasi menekankan pada usaha mencari jalan untuk perbaikan program atau kurikulum dari pada sekedar pengukuran prestasi anak didik saja.

Secara umum evaluasi dapat membantu memperhitungkan potensi murid dalam belajar. Evaluasi dapat memberikan informasi paling akurat mengenai kemampuan akademik siswa. Evaluasi dapat juga menunjukkan bagaimana murid tumbuh, karena itu evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, dengan evaluasi kita dapat melokalisasi kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar. Evaluasi dapat pula dijadikan bahan dalam membimbing

kecerdasan murid dalam memilih bidang keilmuan atau bidang pekerjaan. Pada umumnya evaluasi berguna dalam menentukan kedudukan dan kemajuan siswa. Di sekolah evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai.

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan memberikan penilaian terhadap sukses atau gagalnya kurikulum yang digunakan yang meliputi: desain yang digunakan, aspek atau komponen dalam kurikulum yang dirancang dan implementasinya. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Dengan demikian evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan realible untuk membuat keputusan tentang kurikulum pendidikan yang sedang berjalan atau telah dijalankan.

Menurut Oemar Hamalik, pengembangan kurikulum adalah proses yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi, sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik. Secara sederhana evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematis, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru.

## **TUJUAN EVALUASI KURIKULUM**

Diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan :

### **a. Pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan yang direncanakan**

Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta memastikan tujuan, target dan sasaran dari program, kegiatan atau kebijakan pendidikan dapat tercapai.

### **b. Mengetahui kendala yang di hadapi**

Pelaksanaan evaluasi kurikulum dilaksanakan untuk mengetahui apakah kendala-kendala apa yang dijumpai oleh pelaksana kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan.

### **c. Perbaikan Program**

Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Disini evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang

datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan.

#### **d. Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak**

Pada akhir fase pengembangan kurikulum, perlu adanya semacam pertanggung jawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Bagi pihak pengembang kurikulum, tujuan yang kedua ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam melainkan lebih merupakan suatu 'keharusan' dari luar. Sekalipun demikian hal ini tidak bisa kita hindari karena persoalan ini mencakup pertanggungjawaban sosial, ekonomi dan moral, yang sudah merupakan suatu konsekuensi logis dalam kegiatan pembaharuan pendidikan. Dalam mempertanggung jawabkan hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang kurikulum perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang sedang dikembangkan serta usaha lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Untuk menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut di atas itulah diperlukan kegiatan evaluasi.

## **MODEL EVALUASI KURIKULUM**

### **A. Objek-Objek Evaluasi Kurikulum**

#### **1. Komponen Tujuan**

Komponen tujuan yang dinilai berhubungan dengan tujuan jenjang di atasnya. Yaitu tujuan institusional dan selanjutnya dikaitkan dengan tujuan nasional. Tujuan merupakan acuan dari seluruh komponen dalam Kurikulum terlebih dahulu harus dirumuskan sehingga dengan jelas menggambarkan apa yang hendak dicapai.

#### **2. Komponen Isi/Materi Pelajaran**

Maksud isi kurikulum adalah keseluruhan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Komponen isi kurikulum yang menjadi objek evaluasi, bersumber dari garis-garis besar program pengajaran, untuk setiap mata pelajaran, yang mencakup pokok-pokok bahasan satuan waktu tertentu.

### 3. Strategi Pembelajaran

Komponen ini meliputi berbagai upaya dan penunjang yang diperlukan untuk mencapai tujuan berdasarkan isi yang ditetapkan. Komponen ini melalui berbagai pendekatan dan metode pengajaran, serta peralatan yang digunakan oleh setiap mata pelajaran. Termasuk dalam komponen ini adalah evaluasi proses dan hasil belajar dari setiap mata pelajaran.

### 4. Media

Komponen media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci sehingga dapat dicerna dengan sebaik-baiknya oleh siswa.

### 5. Proses Belajar Mengajar

Komponen belajar-mengajar merupakan komponen kurikulum yang nantinya akan menghasilkan perubahan perilaku (kognitif, afektif dan psikomotorik) para siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 6. Komponen Penunjang

Komponen penunjang merupakan salah satu komponen yang harus dievaluasi. Sebab, komponen ini berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Yang tergolong dalam komponen penunjang antara lain: Sistem administrasi dan supervise, sistem pelayanan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa, dan sistem evaluasi.

## **B. Model Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi kurikulum, metode intruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa. Macam-macam model evaluasi yang dipergunakan bertumpu pada aspek-aspek tertentu yang diutamakan dalam proses pelaksanaan kurikulum. Model evaluasi yang bersifat komparatif berkaitan erat dengan tingkah laku individu, evaluasi yang menekankan tujuan berkaitan erat dengan kurikulum yang menekankan pada bahan ajar atau isi kurikulum. Adapun model (pendekatan) antropologis dalam evaluasi ditujukan untuk mengevaluasi tingkah laku dalam suatu lembaga social. Dengan demikian sesungguhnya terdapat hubungan yang sangat erat antara evaluasi dengan kurikulum.

Model evaluasi kurikulum sebagaimana perkembangan evaluasi kurikulum di Amerika, Inggris dan Australia adalah dibedakan menjadi 3 yaitu: pertama, model yang masuk dalam kategori kuantitatif. Kedua, model kualitatif dan ketiga model-model ekonomi. Adapun penjabarannya masing-masing adalah sebagai berikut, (Hasan, 2008:179) :

## **1. Model Evaluasi Kuantitatif**

Adapun ciri yang menonjol dari evaluasi kuantitatif adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Sehingga model-model evaluasi kuantitatif yang ada menekankan peran penting metodologi kuantitatif dan penggunaan tes. Ciri berikutnya dari model-model kuantitatif adalah tidak digunakannya pendekatan proses dalam mengembangkan criteria evaluasi.

Berikutnya model-model kuantitatif ini sama-sama memiliki fokus evaluasi yaitu pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Dimensi ini (hasil belajar) adalah merupakan kriteria pokok bagi model-model kuantitatif. Adapun diantara model-model evaluasi kurikulum yang terkategori sebagai model evaluasi kuantitatif adalah sebagai berikut.

### **a. Model Black Box Tyler**

Model Tyler dinamakan Black Box karena tidak ada nama resmi yang diberikan oleh pengembangnya. Tyler menuangkan karyanya ini dalam sebuah buku kecil tentang kurikulum. Berkat buku inilah kemudian nama dia menjadi terkenal dan dia disegani. Model evaluasi Tyler di bangun atas dua dasar, yaitu: evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku awal peseta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Berdasar pada dua prinsip ini maka Tyler ingin mengatakan bahwa evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Adapun prosedur pelaksanaan dari model evaluasi Tyler adalah sebagai berikut:

- Menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi. Tujuan kurikulum yang dimaksud disini adalah model tujuan behavioral. Dan model ini di Indonesia sudah dikembangkan sejak kurikulum 1975. Adapun untuk kurikulum KTSP saat ini maka harus mengembangkan tujuan behavioral ini jika berkenaan dengan model kurikulum berbasis kompetensi.
- Menentukan situasi dimana peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan. Dari langkah ini diharapkan evaluator memberikan perhatian dengan seksama supaya proses pembelajaran yang terjadi mengungkapkan hasil belajar yang dirancang kurikulum.

- Menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Alat evaluasi ini dapat berbentuk tes, observasi, kuisioner, panduan wawancara dan sebagainya. Adapun instrument evaluasi ini harus teruji validitas dan reliabilitasnya.

Inilah tiga prosedur dalam evaluasi model Tyler. Adapun kelemahan dari model Tyler ini adalah tidak sejalan dengan pendidikan karena focus pada hasil belajar dan mengabaikan dimensi proses. Padahal hasil belajar adalah produk dari proses belajar. Sehingga evaluasi yang mengabaikan proses berarti mengabaikan komponen penting dari kurikulum.

Adapun kelebihan dari model Tyler ini adalah kesederhanaanya. Evaluator dapat memfokuskan kajian evaluasinya hanya pada satu dimensi kurikulum yaitu dimensi hasil belajar. Sedang dimensi dokumen dan proses tidak menjadi focus evaluasi.

#### **b. Model Teoritik Taylor dan Maguire**

Model evaluasi kurikulum Taylor dan Maguire ini lebih mendasarkan pada pertimbangan teoritik. Model ini melibatkan variabel dan langkah yang ada dalam proses pengembangan kurikulum. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum sesuai model teoritik Taylor dan Maguire meliputi dua hal, yaitu: pertama, mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, personalia, metode, konten, hasil belajar langsung maupun hasil belajar dalam jangka panjang. Dikatakan data objektif karena mereka berasal dari luar pertimbangan evaluator. Kedua, pengumpulan data yang merupakan hasil pertimbangan individual terutama mengenai kualitas tujuan, masukan dan hasil belajar. Adapun cara kerja model evaluasi Taylor dan Maquaire ini adalah sebagai berikut:

- Dimulai dari adanya tekanan/keinginan masyarakat terhadap pendidikan. Tekanan dan tuntutan masyarakat ini dikembangkan menjadi tujuan. Kemudian tujuan dari masyarakat ini dikembangkan menjadi tujuan yang ingin dicapai kurikulum. Adapun dalam pengembangan KTSP maka tekanan dari masyarakat ini dikembangkan pada tingkat Nasional dalam bentuk Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan. Dari dua standar ini maka satuan pendidikan mengembangkan visi dan tujuan yang hendak dicapai satuan pendidikan. Kemudian tujuan satuan pendidikan tersebut menjadi tujuan kurikulum dan tujuan mata pelajaran.
- Evaluator mencari data mengenai keserasian antara tujuan umum dengan tujuan behavioral (tingkah laku). Maka tugas evaluator disini mencari relevansi antara tujuan satuan pendidikan, kurikulum dan mata pelajaran yang berbeda dalam tingkat-tingkat abstraksinya.

- Penafsiran tujuan kurikulum. Pada tahap ini tugas evaluator adalah memberikan pertimbangan mengenai nilai tujuan umum pada tahap pertama. Adapun dua criteria yang dikemukakan oleh Taylor dan Maguire dalam memberi pertimbangan adalah: pertama, kesesuaian dengan tugas utama sekolah. kedua, tingkat pentingnya tujuan kurikulum untuk dijadikan program sekolah. adapun hasil dari kegiatan ini adalah sejumlah tujuan behavioral yang sudah tersaring dan akan dijadikan tujuan yang akan dicapai oleh mata pelajaran yang bersangkutan.
- Mengevaluasi pengembangan tujuan menjadi pengalaman belajar. Tugas evaluator disini adalah menentukan hasil dari suatu kegiatan belajar. Menelaah apakah hasil belajar yang telah diperoleh dapat digunakan dalam kehidupan dimasyarakat. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang menjadikan hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat digunakan dalam kehidupannya di masyarakat.

Demikianlah tahapan pelaksanaan model evaluasi Taylor dan Maguire. Adapun kelebihan dari model ini adalah memberikan kesempatan pada evaluator untuk menerapkan kajian secara komprehensif. Baik nilai maupun arti kurikulum dapat dikaji dengan menggunakan model ini. Adapun masalahnya bila diterapkan di Indonesia bahwa model ini hanya diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Sehingga keseluruhan proses pengembangan kurikulum tingkat nasional tidak dapat dievaluasi dengan model ini.

### **c. Model Pendekatan Sistem Alkin**

Adapun model Alkin ini sedikit unik karena selalu memasukkan unsure pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Adapun pendekatan yang digunakan disebut Alkin dengan pendekatan Sistem. Dua hal yang harus diperhatikan oleh evaluator dalam model ini adalah pengukuran dan control variable. Alkin membagi model ini atas tiga komponen. Yaitu masukan, proses yang dinamakannya dengan istilah perantara (mediating), dan keluaran (hasil). Alkin juga mengenal sistem internal yang merupakan interaksi antar komponen yang langsung berhubungan dengan pendidikan dan system eksternal yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh pendidikan. Model Alkin dikembangkan berdasarkan empat asumsi. Apabila keempat asumsi ini sudah dipenuhi maka model Alkin dapat digunakan. Adapun keempat asumsi itu yaitu:

- Variable perantara adalah satu-satunya variable yang dapat dimanipulasi.
- System luar tidak langsung dipengaruhi oleh keluaran system (persekolahan)
- Para pengambil keputusan sekolah tidak memiliki control mengenai pengaruh yang diberikan system luar terhadap sekolah.

- Factor masukan mempengaruhi aktifitas factor perantara dan pada gilirannya factor perantara berpengaruh terhadap factor keluaran.

Adapun kelebihan dari model ini adalah keterikatannya dengan system. Dengan model pendekatan system ini kegiatan sekolah dapat diikuti dengan seksama mulai dari variable-variable yang ada dalam komponen masukan, proses dan keluaran. Komponen masukan yang dimaksudkan adalah semua informasi yang berhubungan dengan karakteristik peserta didik, kemampuan intelektual, hasil belajar sebelumnya, kepribadian, kebiasaan, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan proses disini meliputi factor perantara yang merupakan kelompok variable yang secara langsung mempengaruhi keluaran. Adapun yang masuk dalam variable perantara ini diantaranya adalah rasio jumlah guru dengan peserta didik, jumlah peserta didik dalam kelas, pengaturan administrasi, penyediaan buku bacaan, prosedur pengajaran dan sebagainya.

Adapun keluaran peserta didik adalah setiap perubahan yang terjadi pada diri peserta didik sebagai akibat dari pengalaman belajar yang diperolehnya. Perubahan ini harus diikuti sejak peserta didik masuk sistem hingga keluar system. Perubahan harus diukur meliputi setiap aspek perubahan yang mungkin terjadi termasuk didalamnya kemampuan peserta didik dalam melanjutkan pelajaran ditingkat pendidikan yang lebih tinggi, pada waktu memasuki lapangan kerja, dalam melakukan pekerjaan bahkan termasuk aktifitas dalam kehidupna di masyarakat.

Dari uraian diatas kita temukan kelemahan dari model Alkin adalah keterbatasannya dalam focus kajian yaitu yang hanya focus pada kegiatan persekolahan. Sehingga model ini hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang sudah siap dilaksanakan disekolah.

#### **d. Model Countenance Stake**

Evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan pihak luar yang tidak terlibat dengan evaluasi. Lebih lanjut, model ini dikembangkan atas keyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya mengenai evaluasi. Dasar ini yang menjadikan keyakinan Stake untuk memberikan tekanan pada pendekatan kualitatif. Dalam model ini stake sangat menekankan peran evaluator dalam mengembangkan tujuan kurikulum menjadi tujuan khusus yang terukur. Model countenance Stake terdiri atas dua matriks. Matrik pertama dinamakan matriks Deskripsi dan yang kedua dinamakan matriks Pertimbangan.

##### **a. Matrik Deskripsi**

Kategori pertama dari matriks deskripsi adalah sesuatu yang direncanakan (intent) pengembangan kurikulum atau program. Seorang guru sebagai pengembang RPP, merencanakan keadaan persyaratan yang diinginkan untuk suatu kegiatan kelas tertentu. Apakah persyaratan tersebut berhubungan dengan peserta didiknya seperti minat, kemampuannya, pengalamannya, dan lain sebagainya yang biasa diistilahkan dengan entry behaviors.

Kategori kedua, dinamakan observasi, berhubungan dengan apa yang sesungguhnya sebagai implementasi dari apa yang diinginkan, pada kategori ini evaluator harus melakukan observasi (pengumpulan data) mengenai tujuan, transaksi, dan hasil yang ada di satuan pendidikan.

#### b. Matrik Pertimbangan

Matrik pertimbangan terdiri atas kategori standart dan kategori pertimbangan, dan fokus tujuan, transaksi, dan outcomes (hasil yang diperoleh).

Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program yang dijadikan evaluan. Standart tersebut dapat dikembangkan dari karakteristik yang dimiliki kurikulum (fidelity) tetapi dapat juga dikembangkan dari yang lain (pre-ordinate, mutually adaptive, proses).

Kategori kedua adalah kategori pertimbangan. Katagori ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori pertama dan kedua matrik deskripsi sampai ke kategori pertama matrik pertimbangan.

Evaluator juga harus memberikan pertimbangan congruence atau perbedaan yang terjadi antara apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi dilapangan. Adapun kelebihan dari model ini adalah adanya analisis yang rinci. Setiap aspek dicoba dikaji kesesuaiannya. Misalkan, analisis apakah persyaratan awal yang direncanakan dengan yang terjadi sesuai apa tidak? Hasil belajar peserta didik sesuai tidak dengan harapan.

#### e. Model CIPP

Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Stufflebeam. Sehingga sesuai dengan namanya, model CIPP ini memiliki 4 jenis evaluasi yaitu: evaluasi Context (konteks), Input (masukan), Process (proses), dan Product (hasil). Adapun tugas evaluator dari keempat jenis evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Evaluasi Context

Tujuan utama dari evaluasi context adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan evaluasi. Evaluator mengidentifikasi berbagai factor guru, peserta didik, manajemen, fasilitas kerja, suasana kerja, peraturan, peran komite sekolah, masyarakat dan factor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kurikulum.

## 2) Evaluasi Input

Evaluasi ini penting karena untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Evaluator menentukan tingkat kemanfaatan berbagai factor yang dikaji dalam konteks pelaksanaan kurikulum. Pertimbangan mengenai ini menjadi dasar bagi evaluator untuk menentukan apakah perlu ada revisi atau pergantian kurikulum. Komponen evaluasi masukan meliputi : 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

## 3) Process

Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Evaluator mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi kurikulum, berbagai kekuatan dan kelemahan proses implementasi. Evaluator harus merekam berbagai pengaruh variable input terhadap proses.

## 4) Product

Adapun tujuan utama dari evaluasi hasil adalah untuk menentukan sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Evaluator mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, membandingkannya dengan standard dan mengambil keputusan mengenai status kurikulum (direvisi, diganti atau dilanjutkan).

Dari uraian diatas diketahui bahwa model CIPP adalah model evaluasi yang tidak hanya dilaksanakan dalam situasi inovasi sedang dilaksanakan, tetapi justru model ini dilakukan ketika inovasi akan dan belum dilaksanakan.

## **2. Model Ekonomi Mikro**

Model ekonomi mikro adalah model yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana model kuantitatif lainnya, maka model ekonomi mikro ini focus pada hasil (hasil dari pekerjaan, hasil belajar dan hasil yang diperkirakan). Adapun pertanyaan besar dalam ekonomi mikro adalah apakah hasil belajar yang diperoleh peserta didik adalah sesuai dengan dana yang dikeluarkan? Adapun model dilingkungan ekonomi mikro ada empat, adapun yang tepat digunakan dalam evaluasi kurikulum adalah model cost effectiveness.

Dalam model cost effectiveness ini seseorang evaluator harus dapat membandingkan dua program atau lebih, baik dalam pengertian dana yang digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan oleh setiap program. Perbandingan hasil ini akan memberikan masukan bagi pembuat keputusan mengenai program mana yang lebih menguntungkan dilihat dari hubungan antara dana dan hasil. Dalam mengukur hasil digunakan instrument yang sudah di standarisasi. Penggunaan instrument standar penting karena dengan demikian perbandingan antara biaya dan hasil dapat dilakukan secara berimbang.

### **3. Model Evaluasi Kualitatif**

Adapun model evaluasi kualitatif selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itulah dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Terdapat dua model evaluasi kualitatif, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Model Studi Kasus**

Adapun model studi kasus (case study) adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Adapun datanya juga akan berupa data kualitatif yang dianggap lebih memberikan makna dibanding data kuantitatif yang kering. Namun demikian kualitatif tidak menolak secara mutlak data kuantitatif.

Dan dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familialisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Apabila evaluator belum familiar dengan kurikulum dan satuan pendidikan yang mengembangkannya maka evaluator ini dilarang melakukan evaluasi. Familialisasi ada dua jenis. Pertama, familialisasi terhadap kurikulum sebagai ide dan sebagai rencana. Familialisasi kedua dilakukan ketika evaluator dilapangan. Evaluator harus menguasai kebiasaan-kebiasaan dalam satuan pendidikan yang dievaluasi.

Setelah familialisasi evaluator bisa melanjutkan pada observasi lapangan dengan baik. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat dianjurkan dalam model studi kasus. Dengan observasi memungkinkan evaluator menangkap suasana yang terjadi secara langsung ketika proses yang diobservasi sedang berlangsung. Adapun ketentuan bagi evaluator ketika menggunakan observasi adalah pertama, haruslah evaluator seorang yang memiliki visi dan pengetahuan luas mengenai focus observasi.

Kedua, kecepatan berfikir, hal ini penting karena evaluator berfungsi sebagai instrument yang selalu terbuka untuk refocusing ataupun membuka dimensi baru dari

masalah yang sedang diamati. Ketiga, evaluator harus cermat dalam menangkap informasi yang diterimanya. Kecermatan ini ditandai oleh tiga hal. Pertama, informasi tertulis sebagaimana yang disampaikan oleh responden, pemkanaan informasi, dan keterkaitan informasi dengan konteks yang lebih luas.

Selain observasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuisioner dan wawancara. Setelah data selesai dikumpulkan maka pengolahan data langsung dilakukan, sebaiknya ketika masih dilapangan. Hal ini memudahkan evaluator apabila ada persoalan baru masih memiliki kesempatan untuk menelusuri secara langsung. Selain itu juga efisiensi waktu. Dari pengolahan data ini dilakukan dengan tindakan evaluator yaitu mengklasifikasi data dan segera membuat laporan hasil evaluasi.

#### b. Model Iluminatif

Model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian tidak hanya pada kelas dimana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Adapun dua dasar konsep yang digunakan model ini adalah:

Dalam langkah pelaksanaannya, model evaluasi iluminatif memiliki tiga kegiatan. Yaitu:

##### a) Observasi

Observasi adalah kegiatan yang penting. Dalam observasi evaluator dapat mengamati langsung apa yang sedang terjadi disuatu satuan pendidikan. Evaluator dapat melakukan studi dokumen, wawancara, penyebaran kuesioner, dan melakukan tes untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Isu pokok, kecenderungan, serta persoalan yang teridentifikasi merupakan pedoman bagi evaluator untuk masuk kedalam langkah berikutnya.

##### b) Inkuiri lanjutan

Dalam tahap inkuiri lanjutan ini evaluator tidak berpegang teguh terhadap temuannya dalam langkah pertama. Kegiatan evaluator dalam tahap ini adalah memantapkan isu, kecenderungan, serta persoalan-persoalan yang ada sampai suatu titik dimana evaluator menarik kesimpulan bahwa tidak ada lagi persoalan baru yang muncul.

##### c) Usaha penjelasan

Dalam langkah memberikan penjelasan ini evaluator harus dapat menemukan prinsip-prinsip umum yang mendasari kurikulum disatuan pendidikan tersebut. Disamping itu evaluator harus dapat menemukan pola hubungan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil dan mengapa kegiatan lainnya dikatakan gagal. Penjelasan merupakan hal penting dalam metode iluminatif.

Adapun evaluasi kurikulum sebagai fenomena sejarah merupakan suatu elemen dalam proses sosial yang dihubungkan dengan perkembangan pendidikan, meliputi tiga model evaluasi, (Syaodih, 2010:185-189).

### **1. Evaluasi model penelitian**

Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologi atau tes psikometrik pada umumnya memiliki dua bentuk, yaitu tes intelegensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Eksperimen lapangan dalam pendidikan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian botani pertanian. Anak dapat disamakan dengan benih, sedang kurikulum serta berbagai fasilitas serta system sekolah dapat disamakan dengan tanah dan pemeliharannya. Untuk mengetahui tingkat kesuburan benih (anak) serta hasil yang diacapai pada akhir program percobaan dapat digunakan tes (pre test dan post tes).

Comparative approach dalam eksperimen lapangan adalah dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak, umpamanya yang menggunakan dua metode belajar yang berbeda. Missal metode global dan metode unsure. Dari situ diketahui kelompok mana yang hasilnya baik. Rancangan penelitian ini membutuhkan persiapan yang sangat teliti dan rinci. Besarnya sampel, variable, hipotesis, tes hasil belajar dan sebagainya perlu dirumuskan dengan tepat.

Adapun kesulitan dari eksperimen ini adalah pertama, kesulitan administrative (sedikit sekolah yang bersedia dijadikan eksperimen). Kedua, masalah teknis yaitu kesulitan menciptakan kondisi kelas yang sama untuk kelompok yang diuji. Ketiga, sukar mencampurkan guru untuk mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok control.

### **2. Evaluasi model Objektif**

Evaluasi model objektif berasal dari Amerika Serikat. Pendekatan ini digunakan oleh Ralph Tylor. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh evaluator model objektif adalah:

- a. Ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum.
- b. Merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa
- c. Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut
- d. Mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan

Dalam evaluasi model objektif ini kemajuan siswa dimonitor oleh guru dengan memberikan tes yang mengukur tingkat penguasaan tujuan-tujuan khusus melalui pre tes dan post tes. Siswa dianggap menguasai unit bila memperoleh skor minimal 80.

### **3. Model campuran multivariansi**

Model evaluasi perbandingan dan model objektif menghasilkan evaluasi model campuran yaitu strategi yang menyatukan unsure-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Adapun langkah-langkah model multivariansi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi
- b. Pelaksanaan program.
- c. Sementara tim penyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran, umpunya dengan metode global dan metode unsure dapat disiapkan tes tambahan.
- d. Bila semua informasi yang diharapkan telah terkumpul maka mulailah pekerjaan computer
- e. Tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh bersama dari beberapa variable yang berbeda.

Adapun kesulitan yang dihadapi dalam model campuran multivariansi ini adalah: pertama, diharapkan memberikan tes statistic yang signifikan. Kedua, terlalu banyaknya variable yang perlu di hitung. Untuk model ini diperlukan variabel sekitar 300. Ketiga, model multivariansi telah mengurangi masalah control berkenaan dengan eksperimen lapangan tetapi tetap menghadapi masalah-masalah perbandingan.

Secara garis besar, berbagai konsep/model evaluasi yang telah dikembangkan tersebut dapat digolongkan ke dalam empat rumpun model – *measurement*, *congruence*, *illumination*, dan *educational system evaluation*.

#### **a. Measurement**

Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan dan perbandingan efektifitas antara dua atau lebih program/metode pendidikan. Obyek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang obyektif dan dapat dibakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data obyektif khususnya skor hasil tes. Dalam kegiatan evaluasi, cenderung ditempuh pendekatan/cara-cara berikut:

- 1) Menempatkan `kedudukan` setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar.
- 2) Membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program/metode pengajaran yang berbeda-beda, melalui analisis secara kuantitatif.
- 3) Teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang disusun dalam bentuk obyektif, yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliabel dan valid.

Konsep *measurement* ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam hal penekanannya terhadap pentingnya obyektivitas dalam proses evaluasi. Aspek obyektivitas yang ditekankan oleh konsep ini perlu dijadikan landasan yang terus menerus di dalam rangka mengembangkan konsep dan sistem evaluasi kurikulum. Samping itu, pendekatan yang digunakan oleh konsep ini masih sangat besar pengaruhnya dan dirasakan faedahnya dalam berbagai kegiatan pendidikan, seperti seleksi dan klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan.

Kelemahan dari konsep ini terletak pada penekanannya yang berlebih-lebihan pada aspek pengukuran dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Aspek pengukuran itu sendiri memang diperlukan dalam proses evaluasi, tapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses evaluasi itu sendiri : *“Measurement is not evaluation, but it can provide useful data for evaluation.”* Dalam evaluasi hasil belajar, misalnya, kita tidak dapat mengelakkan penggunaan alat pengukuran hasil belajar untuk menghasilkan data yang diperlukan dalam pemberian *judgment* selanjutnya mengenai hasil belajar yang telah dicapai.

Sebagai konsekuensi dari penekanan yang berlebih-lebihan pada aspek pengukuran, evaluasi cenderung dibatasi pada dimensi tertentu dari program pendidikan yang ‘dapat diukur’, terutama hasil belajar yang bersifat kognitif. Yang menjadi persoalan disini adalah bahwa hasil belajar yang bersifat kognitif tersebut bukan lah merupakan satu-satunya indikator bagi keberhasilan suatu kurikulum. Sebagai suatu wahana untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan, kurikulum diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri siswa, tidak terbatas hanya pada potensi dibidang kognitif. Disamping itu, peranan evaluasi yang diharapkan akan dapat memberikan input bagi penyempurnaan program dalam setiap tahap, menjadi kurang dapat terpenuhi dengan dibatasinya evaluasi pada pengukuran hasil belajar saja, apalagi hanya ditekankan pada bidang kognitif.

### **b. Congruence**

Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau *congruence* antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Obyek evaluasi dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data obyektif khususnya skor hasil tes. Dalam kegiatan evaluasi, cenderung ditempuh pendekatan/cara-cara berikut:

- Menggunakan prosedur *pre-and post-assessment* dengan menempuh langkah- langkah pokok sebagai berikut: penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi.
- Analisis hasil evaluasi dilakukan secara bagian demi bagian.
- Teknik evaluasi mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan.
- Kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara dua atau lebih program.

Konsep ini telah menghubungkan kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Dengan kata lain, konsep *congruence* ini telah memperlihatkan adanya “*high degree of integration with the instructional process.*” Dengan mengkaji efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan memberikan balikan kepada pengembang kurikulum tentang tujuan-tujuan mana yang sudah dan yang belum dicapai. Hasil evaluasi yang diperoleh tidak bersifat relatif karena selalu dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan.

Kelemahan dari konsep ini terletak pada ruang lingkup evaluasinya. Meskipun tujuan evaluasi diarahkan pada kepentingan penyempurnaan program kurikulum, tapi konsep ini tidak menjadikan input dan proses pelaksanaan sebagai obyek langsung evaluasi. Yang dijadikan perhatian oleh konsep ini adalah hubungan antara tujuan dan hasil belajar. Faktor-faktor penting yang terdapat diantara tujuan dan hasil yang dicapai kurang mendapat perhatian, padahal yang dimensi akan disempurnakan justru adalah faktor-faktor tersebut yaitu input dan proses belajar-mengajar, yang keseluruhannya akan menciptakan suatu tipe pengalaman belajar tertentu.

Masih berhubungan dengan persoalan ruang lingkup evaluasi di atas, pelaksanaan evaluasi dari konsep ini terjadi pada saat kurikulum sudah selesai dilaksanakan, dengan jalan membandingkan antara hasil *pretest* dan *posttest*. Sebagai akibatnya informasi yang dihasilkan hanya dapat menjawab pertanyaan tentang tujuan-tujuan mana yang telah dan yang belum dapat dicapai. Pertanyaan tentang mengapa tujuan-tujuan tertentu belum dapat dicapai, sukar untuk dapat dijawab melalui informasi perbedaan *pretest* dan *posttest*. Dengan kata lain, pendekatan yang digunakan oleh konsep ini menghasilkan suatu teknik evaluasi yang sifatnya terminal / *postfacto*. Pendekatan semacam ini memang membantu pengembang kurikulum dalam menentukan bagian-bagian mana dari program yang masih lemah, tapi kurang membantu di dalam mencari jawaban tentang segi-segi apanya yang masih lemah dan bagaimana kemungkinan mengatasi kelemahan tersebut.

Terlepas dari beberapa kelemahan di atas, konsep ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perkembangan konsep evaluasi kurikulum, khususnya dalam usaha :

1. menghubungkan hasil belajar dengan tujuan-tujuan pendidikan sebagai kriteria perbandingan; dan
2. memperkenalkan sistem pengolahan hasil evaluasi secara bagian demi bagian, yang ternyata lebih relevan dengan kebutuhan pengembangan kurikulum.

### **c. Illumination**

Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai: pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada *judgment* (pertimbangan) yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Obyek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subyektif (*judgment data*) Dalam kegiatan evaluasi, cenderung ditempuh pendekatan/cara-cara berikut:

1. Menggunakan prosedur yang disebut *Progressive focussing* dengan langkah-langkah pokok: orientasi, pengamatan yang lebih terarah, analisis sebab-akibat.
2. Bersifat kualitatif-terbuka, dan fleksibel-eklektif.
3. Teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen dan bila perlu mencakup pula tes.

Sebagai reaksi terhadap konsep *measurement* dan *congruence* yang bersifat 'terminal' seperti telah disinggung dalam bagian yang lalu, konsep *illumination* menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum sedang berlangsung. Gagasan yang terkandung di dalam konsep ini memang penting dan menunjang proses penyempurnaan kurikulum, karena pihak pengembang kurikulum akan memperoleh informasi yang cukup terintegrasi sebagai dasar untuk mengoreksi dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dikembangkan. Di samping itu, jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil evaluasi cukup pendek sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan pada waktunya.

Kelemahan dari konsep ini terutama terletak pada teknis pelaksanaannya. *Pertama*, kegiatan evaluasi tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas sebagai dasar bagi pelaksanaan dan penyimpulan hasil evaluasi. Ini dapat mengakibatkan bahwa sejumlah segi-segi yang penting kurang mendapat perhatian, karena *evaluator* hanyut di dalam

mengamati segi-segi tertentu yang menarik perhatiannya *Kedua*, obyektivitas dari evaluasi yang dilakukan perlu dipersoalkan.

Persoalan obyektivitas evaluasi inilah yang justru dipandang sebagai salah satu kelemahan yang penting dari konsep ini. Di samping konsep ini lebih menitik beratkan penggunaan *judgment* dalam proses evaluasi, juga terdapat adanya kecenderungan untuk menggunakan alat evaluasi yang ‘terbuka’ dalam arti kurang spesifik / berstruktur. Disamping kedua kelemahan di atas, konsep ini juga tidak menekankan pentingnya evaluasi terhadap bahan-bahan kurikulum selama bahan-bahan tersebut disusun dalam tahap perencanaan. Dengan kata lain, evaluasi yang diajukan oleh konsep ini lebih berorientasi pada proses dan hasil yang dicapai oleh kurikulum yang bersangkutan.

#### **d. Educational System Evaluation**

Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara *performance* setiap dimensi program dan kriteria, yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan *judgment*. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Obyek evaluasi mencakup input (bahan, rencana, peralatan), proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data obyektif maupun data subyektif (*judgment data*) Dalam kegiatan evaluasi, cenderung ditempuh pendekatan/cara-cara berikut:

- Membandingkan *performance* setiap dimensi program dengan kriteria internal.
- Membandingkan *performance* program dengan menggunakan kriteria
- eksternal yaitu *performance* program yang lain.
- Teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket dan analisis
- dokumen.

Ditinjau dari hakekat dan ruang lingkup evaluasi, konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi yang positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekankannya peranan kriteria (absolut maupun relatif) dalam proses evaluasi sangat penting artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria kita tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan (*discrepancy*), sedangkan informasi semacam inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi.

Sehubungan dengan ruang lingkup evaluasi, konsep ini mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi program, tidak hanya hasil yang dicapai, tapi juga *input* dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. Ini penting sekali agar penyempurnaan kurikulum dapat dilakukan pada setiap tahap sehingga kelemahan yang masih

terlihat pada suatu tahap tertentu tidak sampai dibawa ke tahap berikutnya. Suatu bagian dari konsep ini yang kiranya dapat dipandang sebagai kelemahan adalah mengenai pandangannya tentang evaluasi untuk menyimpulkan kebaikan program secara menyeluruh.

Ada dua persoalan yang perlu mendapatkan penegasan dari konsep ini, yang pertama menyangkut segi teknis dan yang kedua menyangkut segi strategis. Persoalan teknis berkenaan dengan prosedur yang ditempuh dalam membandingkan hasil antara kurikulum yang baru dan kurikulum yang ada. Pengalaman-pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa studi perbandingan semacam ini pada umumnya berakhir dengan kesimpulan ‘tidak adanya perbedaan yang berarti’. Persoalan strategis menyangkut persoalan ‘nasib’ dari kurikulum yang baru tersebut bila hasil perbandingan yang dilakukan menunjukkan ‘perbedaan yang tidak berarti’. Bila hal itu terjadi, apakah kita akan ‘menarik kembali’ kurikulum yang baru tersebut untuk kembali ke kurikulum yang ada ataukah mengembangkan kurikulum baru yang lain lagi ? Bagaimana kah hal ini dapat dipertanggung-jawabkan dari segi biaya yang telah dikeluarkan maupun dari segi siswa-siswa yang telah menggunakan kurikulum baru tersebut selama bertahun-tahun ? Secara keseluruhan, konsep *educational system evaluation* ini relevan dengan peranan evaluasi didalam proses pengembangan kurikulum dan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam konsep-konsep yang terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamalik, Oemar, Pengembangan Kurikulum, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Hasan, S. Hamid, Evaluasi Kurikulum, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Nasution, S. 2008. Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sukmadinata, Nana S. 2010. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudijono, Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2011. Kurikulum Pembelajaran. Jakarta. Rajawali Press.

## **MATERI 2**

### **MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM**

#### **PENDAHULUAN**

Saat ini telah banyak dikembangkan model pengembangan kurikulum. Setiap model pengembangan kurikulum tersebut memiliki karakteristik pada pola desain, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut dalam pembelajaran. Dalam pengembangan kurikulum dapat diidentifikasi berdasarkan basis apa yang akan dicapai dalam kurikulum tersebut, seperti alternatif yang menekankan pada kebutuhan mata pelajaran, peserta didik, penguasaan kompetensi suatu pekerjaan, kebutuhan masyarakat atau permasalahan sosial. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandaskan pada teori yang tepat agar kurikulum yang dihasilkan bisa efektif.

Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Model pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang sifatnya sentralisasi berbeda dengan yang desentralisasi. Model pengembangan dalam kurikulum yang sifatnya subjek akademis berbeda dengan kurikulum humanistik, teknologis dan rekonstruksi sosial.

#### **MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM**

##### **1. The Administrative Model (Top Down/Line Staff)**

Gagasan pengembangan kurikulum untuk model administratif datang dari para administrator (dirjen, direktur atau kepala kantor wilayah pendidikan) pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Anggota-anggota komisi atau tim ini terdiri atas, pejabat di bawahnya, para ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan.

Tugas tim atau komisi ini adalah merumuskan konsep-konsep dasar, landasan-landasan, kebijaksanaan, dan strategi utama dalam pengembangan kurikulum. Setelah hal-hal yang mendasar ini terumuskan dan mendapatkan pengkajian yang saksama, administrator

pendidikan menyusun tim atau komisi kerja pengembangan kurikulum. Para anggota tim atau komisi ini terdiri atas para ahli pendidikan/kurikulum, ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, guru-guru bidang studi yang senior. Tim kerja pengembangan kurikulum bertugas menyusun kurikulum yang sesungguhnya yang lebih operasional, dijabarkan dari konsep-konsep dan kebijaksanaan dasar yang telah digariskan oleh tim pengarah. Tugas tim kerja ini merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan yang lebih umum, memilih dan menyusun sekuens bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut bagi guru-guru.

Setelah semua tugas dari tim kerja pengembang kurikulum tersebut selesai, hasilnya dikaji ulang oleh tim pengarah serta para ahli lain yang berwenang atau pejabat yang kompeten. Setelah mendapatkan beberapa penyempurnaan, dan dinilai telah cukup baik, administrator pemberi tugas menetapkan berlakunya kurikulum tersebut serta memerintahkan sekolah sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut.

Karena sifatnya yang datang dari atas, model pengembangan kurikulum demikian disebut juga model "top down" atau "line staff". Pengembangan kurikulum dari atas, tidak selalu segera berjalan, sebab menuntut kesiapan dari pelaksanaannya, terutama guru-guru. Mereka perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dan penjelasan atau mungkin juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kebutuhan akan adanya penataran sering tidak dapat dihindarkan.

Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, selama tahun-tahun permulaan diperlukan pula adanya kegiatan monitoring, pengamatan dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat perlu juga dilakukan suatu evaluasi, untuk menilai baik validitas komponen-komponennya, prosedur pelaksanaan maupun keberhasilannya. Penilaian menyeluruh dapat dilakukan oleh tim khusus dari tingkat pusat atau daerah, sedang penilaian persekolah dapat dilakukan oleh tim khusus sekolah yang bersangkutan. Hasil penilaian tersebut merupakan umpan balik, baik bagi instansi pendidikan di tingkat pusat, daerah, maupun sekolah.

## **2. The Grass Roots Model**

Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama, digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan/kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grass roots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Dalam model

pengembangan yang bersifat grass roots seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Apabila kondisinya telah memungkinkan, baik dilihat dari kemampuan guru-guru, fasilitas, biaya maupun bahan-bahan kepustakaan, pengembangan kurikulum model grass roots, akan lebih baik. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu kebutuhan kelasnya, oleh karena itu dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya.

Pengembangan kurikulum yang bersifat grass roots, mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau daerah lain. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi dengan model grass rootsnya, memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu dan sistem pendidikan, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri dan kreatif.

### **3. Beauchamp's System**

Ada lima hal yang terdapat dalam model pengembangan kurikulum Beauchamp's

a. Menetapkan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut.

menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi ataupun seluruh negara. Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Walaupun daerah yang menjadi wewenang kepala kanwil pendidikan dan kebudayaan mencakup suatu wilayah propinsi, tetapi arena pengembangan kurikulum lianya mencakup satu daerah kabupaten saja sebagai pilot proyek.

b. Menetapkan personalia

Menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada empat kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yaitu: (1) para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar, (2) para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih, (3) para profesional dalam sistem pendidikan, (4) profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

Beauchamp mencoba melibatkan para ahli dan tokoh-tokoh pendidikan seluas mungkin, yang biasanya pengaruh mereka kurang langsung terhadap pengembangan kurikulum, dibanding dengan tokoh-tokoh lain seperti, para penulis dan penerbit buku, para pejabat pemerintah, politikus, dan pengusaha serta industriawan. Penetapan personalia ini sudah tentu disesuaikan dengan tingkat dan luas wilayah arena. Untuk tingkat propinsi atau nasional tidak terlalu banyak melibatkan guru. Sebaliknya untuk tingkat kabupaten, kecamatan atau sekolah keterlibatan guru-guru semakin besar.

Mengenai keterlibatan kelompok-kelompok personalia ini, Beauchamp mengemukakan tiga pertanyaan: (1) Haruskah kelompok ahli/pejabat/profesi tersebut dilibatkan dalam pengembangan kurikulum?, (2) Bila ya, apakah peranan mereka?, (3) Apakah mungkin ditemukan alat dan cara yang paling efektif untuk melaksanakan peran tersebut?

c. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum.

organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Beauchamp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam lima langkah, yaitu; (1) Membentuk tim pengembang kurikulum, (2) menga-dakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan, (3) Studi penjajagan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru, (4) merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru, (5) penyusunan dan penulisan kurikulum baru.

d. Implementasi Kurikulum

implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat.

e. Evaluasi Kurikulum

Langkah ini minimal mencakup empat hal, yaitu: (1) evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, (2) evaluasi desain kurikulum, (3) evaluasi hasil belajar siswa, (4) evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Data yang diperoleh dari hasil

kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum, serta prinsip-prinsip melaksanakannya.

#### **4. The Demonstration Model**

Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grass roots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Karena sifatnya ingin mengubah atau mengganti kurikulum yang ada, pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak-pihak tertentu.

Menurut Smith, Stanley, dan Shores ada dua variasi model demonstrasi ini. Pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Proyek ini bertujuan mengadakan penelitian dan pengembangan tentang salah satu atau beberapa segi/komponen kurikulum. Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan bagi lingkungan yang lebih luas. Kegiatan penelitian dan pengembangan ini biasanya diprakarsai dan diorganisasi oleh instansi pendidikan yang berwewenang seperti, direktorat pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan, dan sebagainya.

Bentuk yang kedua, kurang bersifat formal. Beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri. Mereka mencoba menggunakan hal hal lain yang berbeda dengan yang berlaku. Dengan kegiatan ini mereka mengharapkan ditemukan kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih baik, untuk kemudian digunakan di daerah yang lebih luas.

Ada beberapa kebaikan dari pengembangan kurikulum dengan model demonstrasi ini. Pertama, karena kurikulum disusun dan dilaksanakan dalam situasi tertentu yang nyata, maka akan dihasilkan suatu kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih praktis. Kedua, perubahan atau penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil atau aspek tertentu yang khusus, sedikit sekali untuk ditolak oleh administrator, dibandingkan dengan perubahan dan penyempurnaan yang menyeluruh. Ketiga, pengembangan kurikulum dalam skala kecil dengan model demonstrasi dapat menentukan hambatan yang sering dialami. Keempat, model ini sifatnya yang grass roots menempatkan guru sebagai pengambil inisiatif dan nara sumber yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program baru. Kelemahan model ini, adalah bagi

guru- guru yang tidak turut berpartisipasi mereka akan menerimanya dengan enggan- enggan, dalam keadaan terburuk mungkin akan terjadi apatisme.

## 5. Taba's Inverted Model

Menurut cara yang bersifat tradisional pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif, dengan urutan:

- 1) Penentuan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan dasar,
- 2) Merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu,
- 3) Menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh,
- 4) Melaksanakan kurikulum di dalam kelas.

Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari model tradisional.

Ada lima langkah dalam model ini

### a. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru.

Dalam unit eksperimen ini diadakan studi yang saksama tentang hubungan antara teori dengan praktik. Perencanaan didasarkan atas teori yang kuat, dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data yang untuk menguji landasan teori yang digunakan. Ada delapan langkah dalam kegiatan unit eksperimen ini;

1. Mendiagnosis kebutuhan,
2. Merumuskan tujuan-tujuan khusus,
3. Memilih isi,
4. Mengorganisasi isi,
5. Memilih pengalaman belajar,
6. Mengorganisasi pengalaman belajar,
7. Mengevaluasi,
8. Melihat sekuens dan keseimbangan.

### b. Menguji unit eksperimen.

Mesti sudah diuji dikelas eksperimen, tetapi masih harus diuji di kelas dan tempat lain untuk mengetahui validitas dan kepraktisannya, serta menghimpun data bagi penyempurnaan.

c. Revisi dan konsolidasi.

Data yang diperoleh dari pengujian digunakan untuk perbaikan, selain itu perlu diadakan kegiatan konsolidasi yaitu penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang lebih bersifat umum yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas

d. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum.

Selanjutnya kurikulum yang telah di revisi dan konsolidasi harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para profesional kurikulum yang lain, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah konsep dasar teori yang dipakai sudah masuk dan sesuai.

e. Implementasi dan diseminasi (Penyebaran informasi/inovasi)

## 6. Roger's Interpersonal Relations Model

Meskipun Rogers bukan seorang ahli pendidikan (ia ahli psikologi atau psikoterapi) tetapi konsep-konsepnya tentang psikoterapi khususnya bagaimana membimbing individu juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dan pengembangan kurikulum. Memang ia banyak mengemukakan konsepnya tentang perkembangan dan perubahan individu.

Menurut Rogers manusia berada dalam proses perubahan (*becoming, developing, changing*), sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu perkembangan anak, mereka hanyalah pendorong dan pemelancar perkembangan anak. Ada empat langkah pengembangan kurikulum model Rogers.

### 1. Pemilihan target dari sistem pendidikan.

Di dalam penentuan target ini satu satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Selama satu minggu para pejabat pendidikan/administrator melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang relaks, tidak formal. Melalui kegiatan kelompok ini mereka akan mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut.

a. He is less protective of his own beliefs and can listen more accurately

b. He finds it easier and less threatening to accept innovative ideas.

c. He has less need to protect bureaucratic rules.

d. He communicates more clearly and realistically to superiors, peers, and subordinates because he is more open and less self-protective.

- e. He is more person oriented and democratic.
- f. He openly confronts personal emotional frictions between him self and colleagues.
- g. He is more able to accept both positive and negative feedback and use it constructively (Rogers, 1967:722).

2. Partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif.

Sama seperti yang dilakukan para pejabat pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Keikutsertaan guru dalam kelompok tersebut sebaiknya bersifat suka rela, lama kegiatan kalau bisa satu minggu lebih baik, tetapi dapat juga kurang dari satu minggu. Efek yang akan diterima guru-guru sejalan dengan para administrator, dengan beberapa tambahan.

- a) He is more able to listen to students,
- b) He accepts innovative, troublesome ideas from students, rather than insisting on conformity,
- c) He pays as much attention to his relationships with student as he does to course content,
- d) He works out problems with students rather than responding in a disciplinary and punitive manner,
- e) He develops an equalitarian and democratic classroom climate (Rogers, 1967:724).

3. Pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran.

Selama lima hari penuh siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok, dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Dan kegiatan ini para siswa akan mendapatkan:

- a) He feels freer to express both positive and negative feelings in class.
- b) He works through these feelings toward a realistic solution.
- c) He has more energy for learning because he has less fear of constant evaluation and punishment.
- d) He discovers that he is responsible for his own learning
- e) He awes and tear of authority diminish as he finds teachers
- f) He finds that the learning process enables him to deal with his lily (Rogers, 1967:725).

#### 4. Partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok.

Kegiatan ini dapat dikoordinasi oleh BP3 masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok dapat tiga jam tiap sore hari selama seminggu atau 24 jam secara terus menerus. Kegiatan ini bertujuan memperkaya orang-orang dalam hubungannya dengan sesama orang tua, dengan anak, dan dengan guru. Rogers juga menyarankan, kalau mungkin ada pengalaman kegiatan kelompok yang bersifat campuran. Kegiatan merupakan kulminasi dari semua kegiatan kelompok di atas.

Model pengembangan kurikulum dari Rogers ini berbeda dengan model-model lainnya. Sepertinya tidak ada suatu perencanaan kurikulum tertulis, yang ada hanyalah rangkaian kegiatan kelompok. Itulah ciri khas Carl Rogers sebagai seorang Eksistensial Humanis, tidak mementing formalitas, rancangan tertulis, data, dan sebagainya. Bagi Rogers yang penting adalah aktivitas dan interaksi. Berkat berbagai bentuk aktivitas dalam interaksi ini individu akan berubah. Metode pendidikan yang diutamakan Rogers adalah sensitivity training, encounter group dan Training Group (T Group).

#### 5. **The Systematic Action Research Model**

Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut model ini menekankan pada tiga hal itu: hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional.

Kurikulum dikembangkan dalam konteks harapan warga masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat, pengusaha, siswa, guru, dan lain-lain, mempunyai pandangan tentang bagaimana pendidikan, bagaimana anak belajar, dan bagaimana peranan kurikulum dalam pendidikan dan pengajaran. Penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat, dan salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan prosedur action research.

- (1) Mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum, berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh, dan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Dari hasil kajian tersebut dapat disusun rencana yang menyeluruh tentang cara-cara mengatasi masalah tersebut, serta tindakan pertama yang harus diambil.

- (2) Implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Tindakan ini segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta. Kegiatan pengumpulan data ini mempunyai beberapa fungsi : (a) menyiapkan data bagi evaluasi tindakan; (b) sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi; (c) sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi; (d) sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut.

## 6. **Emerging Technical Model**

Model ini dipengaruhi oleh perkembangan dalam bidang teknologi dan efektivitas dan efisiensi dalam dunia bisnis, sehingga muncul model – model seperti :

- a. The Behavioral Analysis Model, yang menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Suatu perilaku yang kompleks diuraikan menjadi perilaku-perilaku sederhana yang tersusun secara hierarkis. Peserta didik mempelajari perilaku-perilaku tersebut secara berangsur-angsur menuju yang lebih kompleks.
- b. The System Analysis Model, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Langkah – langkah yang ditempuh dalam model ini adalah : (1) menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik; (2) menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut; (3) mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan; dan (4) membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan
- c. The Computer-Based Model, yaitu suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Pengembangan dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum, tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil yang diharapkan. Kepada para peserta didik dan guru-guru diminta untuk melengkapi pertanyaan tentang unit-unit kurikulum tersebut atau pencapaian unit kurikulum. Setelah diadakan pengolahan disesuaikan dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik, selanjutnya disimpan dalam komputer. Data komputer tersebut dimanfaatkan dalam menyusun isi materi pelajaran untuk peserta didik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sukmadinata, Nana S. 2010. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.



## MATERI 3

### KONSEP MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### 1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kurikulum, sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan maka harus benar-benar dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakukan karena sifat kurikulum yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa.

#### 2. Manajemen

Istilah manajemen memiliki pemahan yang sama dan beberapa berpendapat pun memiliki pemahaman yang berbeda dengan administrasi. Sedangkan manajemen dalam konsep ini merupakan suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. ATAU Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi ATAU Kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik perorangan/kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama yang di dasari rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ATAU Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai, dengan tujuan agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien.

#### 3. Prinsip Manajemen

Keberhasilan sebuah manajemen tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen yang menjadi dasar-dasar dan nilai pada manajemen itu sendiri. Seorang industrialis asal Perancis, Henry Fayol, berpendapat, bahwa prinsip-prinsip dalam manajemen sebaiknya bersifat lentur

dalam arti bahwa perlu di pertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah.

Prinsip- prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari :

a. Pembagian kerja (Division of work)

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional/objektif, bukan emosional subyektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Dengan adanya prinsip the right man in the right place akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efisiensi kerja.

b. Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility)

Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility) harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang makin kecil pula pertanggungjawaban demikian pula sebaliknya. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban.

c. Disiplin (Discipline)

Disiplin (Discipline) merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya.

d. Kesatuan perintah (Unity of command)

Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik.

e. Kesatuan pengarahan (Unity of direction)

Pelaksanaan kesatuan pengarahan (unity of direction) tidak dapat terlepas dari Pembagian kerja(Division of work), Wewenang dan tanggung jawab (Authority and responsibility), Disiplin(Discipline), serta Kesatuan perintah (Unity of command). Oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana karyawan mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya.

f. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri

Prinsip pengabdian kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi dapat terwujud, apabila setiap karyawan merasa senang dalam bekerja sehingga memiliki disiplin yang tinggi. Setiap karyawan dapat mengabdikan kepentingan pribadi kepada kepentingan organisasi apabila memiliki kesadaran bahwa kepentingan pribadi sebenarnya tergantung kepada berhasil-tidaknya kepentingan organisasi.

g. Penggajian pegawai

Prinsip *more pay for more prestige* (upaya lebih untuk prestasi lebih), dan prinsip upah sama untuk prestasi yang sama perlu diterapkan sebab apabila ada perbedaan akan menimbulkan ketidak disiplin dan kemalasan dalam bekerja. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan tercapainya tujuan dan keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Dalam prinsip penggajian dipikirkan cara agar karyawan dapat bekerja dengan tenang, menimbulkan kedisiplinan dan kegairahan kerja.

h. Pemusatan (Centralization)

Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang (*delegation of authority*). Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak ada orang yang memegang wewenang tertinggi atau manajer puncak.

i. Hirarki (tingkatan)

Hirarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. dengan adanya hirarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan hirarki.

j. Ketertiban (Order)

Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang.

#### k. Keadilan dan kejujuran

Keadilan dan kejujuran terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan mulai dari atasan karena atasan memiliki wewenang yang paling besar. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### l. Stabilitas kondisi karyawan

Sebagai makhluk sosial manusia yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaan tertekan dan pikiran yang kacau akan menimbulkan guncangan dalam bekerja. Dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Kestabilan karyawan terwujud karena adanya disiplin kerja yang baik dan adanya ketertiban dalam kegiatan.

#### m. Prakarsa (Inisiatif)

Prakarsa (inisiatif) mengandung arti menghargai orang lain, karena itu hakikatnya manusia butuh penghargaan. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam prakarsa terhimpun kehendak, perasaan, pikiran, keahlian dan pengalaman seseorang. Setiap penolakan terhadap prakarsa karyawan merupakan salah satu langkah untuk menolak gairah kerja. Manajer yang bijak akan menerima dengan senang hati prakarsa-prakarsa yang dilahirkan karyawannya.

#### n. Semangat kesatuan dan semangat korps

Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan lain dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat kesatuan (*esprit de corp*), sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan *friction de corp* (perpecahan dalam korp) dan membawa bencana. Karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja sama yang baik.

### **4. Pentingnya Manajemen Dalam Pengembangan Kurikulum**

Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamis dan menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan nasional dibidang pendidikan, sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Masalah-masalah dalam proses pengembangan kurikulum (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi) menjadi dasar pemikiran perlunya manajemen pengembangan kurikulum baik dalam perencanaan maupun implementasi kurikulum secara operasional, konsep manajemen pengembangan kurikulum pada dasarnya

mencakup konsep pengembangan kurikulum dan konsep manajemen yang terintegrasi dan menyeluruh.

Ilmu Manajemen harus menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum karena fungsi manajemen dalam pengembangan kurikulum sejalan dengan manajemen itu sendiri. Para pengembangan kurikulum mengikuti pola dan alur pikir yang sinkron dengan pola dalam manajemen yakni kegiatan pengembangan kurikulum dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan kontrol serta perbaikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## MATERI 4

### PRINSIF MANAJEMEN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen berarti melaksanakan kegiatan Pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen atau berdasarkan proses manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, fungsi manajemen menurut Henry Fayol meliputi: *planning*, *organizing*, *commanding*, *staffing*, *coordinating*, dan *controlling*.

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

Merupakan rangkaian tindakan untuk kedepan, diisusun sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya agar dapat menentukan kerangka untuk melaksanakan fungsi lainnya. Dengan tujuan untuk mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkordinasi guna memperoleh hasil yang diinginkan. Esensi Perencanaan memiliki antisipasi ke depan dan perencanaan yang dilakukan berdasarkan latar belakang informasi yang intelegen, premises dan asumsi mengenai kondisi kedepan.

Ada Empat Tahap Dasar Perencanaan:

##### a. Menetapkan Tujuan Atau serangkaian tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan tujuan yang jelas organisasi akan menggunakan sumber daya-sumber dayanya secara tidak efektif.

##### b. Merumuskan keadaan

Pemahaman akan sisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.

##### c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta

anacaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan

d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilain alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antar berbagai alternatif yang ada.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu

Pengorganisasian dalam kurikulum terdiri dari dua pendekatan yaitu dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik. Dalam konteks manajemen organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk organisasi sebagai berikut :

- a. Organisasi perencanaan kurikulum
- b. Organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum
- c. Organisasi dalam evaluasi kurikulum

Sedangkan dalam konteks administrasi organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk organisasi sebagai berikut :

- a. Kurikulum mata ajaran, yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah
- b. Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan beberapa mata ajaran sejenis.
- c. Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topic atau masalah tertentu.
- d. Core curriculum, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.

3. Penyusunan Staf (staffing)

Istilah staffing diberikan Luther Gulick, Harold Koonz dan Cyril O'Donnel sedang assembling resources dikemukakan oleh William Herbart Newman. Kedua istilah itu cenderung mengandung pengertian yang sama. Staffing merupakan salah satu fungsi

manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

Organizing dan staffing merupakan dua fungsi manajemen yang sangat erat hubungannya. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut.

#### 4. Commanding/Directing (Pengarahan)

Directing merupakan fungsi manajemen yang dalam bahasa Indonesia disebut pengarahan. Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Directing dikatakan sebuah proses dimana para manajer membimbing dan mengawasi kinerja para pekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Mengarahkan dikatakan sebagai jantung dari proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, staf yang sudah didapat tidak akan penting apabila tidak ada yang mengawasi dan membimbing. Tindakan pengarahan di mulai dari saat melakukan kegiatan, pengarahan ini dirancang agar pekerja bekerja secara efektif, efisien supaya dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Mengarahkan adalah fungsi membimbing, menginspirasi, mengawasi, supaya tujuan tercapai.

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan pada dasarnya akan berkaitan dengan motivasi, komunikasi, dinamika kelompok, dan kepemimpinan.

#### 5. Coordinating

Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang mengikat semua fungsi lain dari manajemen.

koordinasi (coordination) mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang penyampaian tujuan. Pengkoordinasian merupakan rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah

tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, percekocokan, kekembaran kerja atau kekosongan kerja.

Koordinasi adalah elemen integral atau bahan dari semua fungsi manajerial sebagaimana dijelaskan di bawah:

- a) Koordinasi melalui Perencanaan - Perencanaan memfasilitasi koordinasi dengan mengintegrasikan berbagai rencana melalui diskusi bersama, pertukaran ide. Misalnya koordinasi antara anggaran keuangan dan anggaran pembelian.
- b) Koordinasi melalui Pengorganisasian - Mooney menganggap koordinasi sebagai esensi pengorganisasian. Bahkan ketika manajer kelompok dan memberikan berbagai kegiatan untuk bawahan, dan ketika ia menciptakan menonjol koordinasi departemen dalam benaknya.
- c) Koordinasi melalui Staffing - Seorang manajer harus ingat bahwa hak personil di berbagai posisi dengan tepat jenis pendidikan dan keterampilan yang diambil yang akan menjamin orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
- d) Koordinasi melalui Mengarahkan - Tujuan memberi perintah, instruksi & bimbingan kepada bawahan dilayani hanya ketika ada keselarasan antara atasan dan bawahan.
- e) Koordinasi melalui Mengontrol - Manajer memastikan bahwa harus ada koordinasi antara kinerja aktual dan kinerja standar untuk mencapai tujuan organisasi.

## 6. Pengontrolan

Kontrol manajemen dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, rencana, atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa manusia dan sumber daya lainnya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Pengontrolan Kurikulum dalam prinsip manajemen terdiri dari (1) Kontrol Budget, (2) Kontrol Kebijakan, (3) Kontrol Prosedur, (4) Kontrol Standar, (5) Kontrol Kurikulum.

## DAFTAR PUSTAKA

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## **MATERI 5**

### **MANAJEMEN PERENCANAAN KURIKULUM**

Manajemen perencanaan kurikulum merupakan kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, atau suatu proses yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan dalam perencanaan kurikulum. Dalam prinsip manajemen faktor pimpinan merupakan faktor utama karena kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan resources akan menentukan keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu hal pertama yang harus di perhatikan adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum. Secara garis besar ada dua yaitu.

a. Administrative approach

Merupakan kurikulum direncanakan oleh pihak atasan (administrator pendidikan) kemudian diturunkan kepada instansi bawahan terus ke guru. Guru dalam pendekatan ini tidak dilibatkan dan bersifat pasif.

b. Grass Roots Approach

Kepala sekolah serta guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat kekurangan dalam kurikulum yang lalu dengan harapan dapat meluas kesekolah lain. Hal ini dapat terjadi karena guru adalah manajer dimana guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum yang sudah disusun.

Perencanaan Kurikulum merupakan perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa kearah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan telah terjadi pada diri siswa. Dalam setiap perencanaan kurikulum perencana harus memperhatikan dan menganalisis kondisi yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum. Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kebijakan Pendidikan Nasional
- b. Kondisi Sosialkultural
- c. Kondisi Fasilitas Sarana dan Prasarana
- d. Kondisi Sumber Daya Manusia

## **A. Fungsi Perencanaan Kurikulum**

1. Sebagai pedoman atau alat manajemen dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yang berisi petunjuk tentang jenis, sumber peserta, media, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, evaluasi dan lain-lain untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.
2. Sebagai penggerak roda atau pencipta perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik

## **B. Model Perencanaan Kurikulum**

1. Rasional Tyler / Rasional Deduktif

Menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifik tujuan tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini cocok untuk sistem pendidikan sentralistik yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat.

2. Interaktif Rasional.

Model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat yang berbeda, model ini dinamakan model situasional yang menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan intensif pada tingkat sekolah dan local. Hal ini dimungkinkan karena suatu keyakinan ideology masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah.

3. The Disciplines Model

Perencanaan ini menitik beratkan pada guru. Dimana guru sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan pengetahuan filosofis, sosiologi, psikologi,

4. No Planning

Merupakan suatu model berdasarkan pertimbangan intuitif guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, hanya sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat dan analisis intelektual.

Keempat model tersebut merupakan model idel dan bukan model perencanaan yang actual. Umumnya perencanaan kurikulum mengandung empat model tersebut.

## **C. Prinsip Perencanaan**

1. Perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil (tujuan) yang diharapkan sekolah.

2. Perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa.
3. Perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah.
4. Perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan, kesanggupan, dan taraf kematangan siswa (level of pupils).
5. Perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah.
6. Perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman.
7. Kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu pembentukan karakter, kepribadian, dan perlengkapan pengetahuan dasar siswa yang bernilai demokratis dan yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perencanaan harus realistis, feasible (dapat dikerjakan), dan acceptable (dapat diterima dengan baik).

#### **D. Sifat Perencanaan**

1. Bersifat strategis Karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Bersifat komprehensif yang mencakup keeluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghiduan masyarakat
3. Bersifat integrative Yang menintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas
4. Bersifat realistic Berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan masyarakat
5. Bersifat humanistic Menitik beratkan pada pengembangan sumberdaya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif
6. Bersifat Futuralistik Mengacu jauh kedepan dalam merencanakan masyarakat yang maju
7. Bagian Integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistemik
8. Mengacu pada Pengembangan Kompetensi
9. Berdiversifikasi untuk melayani keseragaman peserta didik

10. Bersifat Desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

#### **E. Azas Perencanaan Kurikulum**

1. Objektivitas, Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan, Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.
3. Manfaat, Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Efisiensi dan Efektivitas, Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan.
5. Kesesuaian, Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan IPTEK, dan perubahan/perkembangan masyarakat.
6. Keseimbangan, Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan.
7. Kemudahan, Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
8. Berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
9. Pembakuan. Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat sampai daerah.
10. Mutu, Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

## **F. Langkah-langkah Merancang Suatu Kurikulum**

### **1. Perumusan Tujuan.**

Di dalam merumuskan tujuan, perlu diperhatikan apa yang ingin didapat oleh peserta didik setelah melaksanakan proses pendidikan. Dalam perumusan tujuan, perlu diingat :

- Tujuan adalah pada diri peserta
- Tujuan berupa hasil belajar perilaku tertentu (biasanya dinyatakan dengan infinitive / kata kerja tertentu)
- Objek dari tujuan itu (berupa materinya)

Berikut ini contoh perumusan tujuan yang baik :

"Memiliki *kemampuan dan pemahaman* untuk *mengembangkan kurikulum* secara mendalam dan mampu mengembangkannya secara optimal baik pada tingkat sekolah maupun bidang studi."

Tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum adalah tujuan umum yang tidak bisa langsung dilakukan pengamatan atau pengukuran.

### **2. Perumusan Isi Kurikulum**

Isi kurikulum adalah Keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Atau dapat dikatakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya.

### **3. Perumusan Metode dan Strategi Pembelajaran**

Metode atau strategi yang dipilih dirincikan. Untuk suatu tujuan atau materi tertentu bisa saja digunakan beberapa metode, demikian juga sebaliknya. Tahapan ini berisi berbagai aktifitas yang diberikan pada pembelajaran dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas ini didesain agar memungkinkan siswa memperoleh muatan yang ditentukan sehingga tujuan yang ditetapkan terutama maksud dan tujuan kurikulum dapat tercapai.

### **4. Merancang Strategi Bimbingan**

Merupakan keseluruhan proses bimbingan untuk membantu siswa memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapinya dan memperbaiki serta mengembangkan kemampuannya sehingga tujuan kurikulum yang telah ditentukan dapat terwujud.

### **5. Sumber**

Sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditentukan.

### **6. Penentuan evaluasi yang diperlukan**

Evaluasi dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka. Dari evaluasi akan didapat keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa dan pelaksanaan

kurikulum oleh guru. Serta apakah tujuan kurikulum yang ada telah terlaksana dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## **MATERI 6**

### **MANAJEMEN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM**

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkat yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru.

#### **A. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Sekolah**

Di tingkat sekolah kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dll. Berikut beberapa tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum.

##### **a. Kepala sekolah sebagai pimpinan**

Tanggung jawab yang dilakukan adalah memimpin sekolah melaksanakan dan membina serta mengembangkan kurikulum. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain atau kelompok agar mereka berbuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

##### **b. Seorang Administrator**

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, pendokumenan serta kegiatan pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi personalia, administrasi kearsipan dan administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan dengan cara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktifitas sekolah.

##### **c. Penyusunan Rencana Tahunan**

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, sekolah memerlukan peningkatan dan pengembangan dalam berbagai aspek, misalnya dalam hal kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasaran, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, dalam pendidikan, serta lain-lain. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya dilakukan upaya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) agar sekolah memiliki rambu-rambu yang bisa

dijadikan landasan dalam pengelolaan program, implementasi, memonitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur.

d. Pembinaan Organisasi Sekolah

Pelaksanaan kurikulum membutuhkan dukungan organisasi sekolah yang kuat dimana ditunjang oleh guru, staf tata usaha,osis, organisasi orang tua dan bagian-bagian lain. Dimana dengan organisasi yang lengkap dituntut kemampuan organisasi yang memadai dari seorang kepala sekolah.

e. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum

f. Sistem Komunikasi dan Pembinaan Kurikulum (Sebagai supervisor)

## **B. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas**

Pada tahap pelaksanaan ini mencakup proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Menurut standart proses yang terdapat pada Permendiknas No.41 tahun 2006, Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru setidaknya harus terdiri atas tiga bagian penting yaitu

1. Kegiatan pendahuluan. Disampaikan kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai,
2. Kegiatan inti terdiri atas tiga tahap yaitu: eksplorasi \*, elaborasi\* dan konfirmasi\*.
3. Penutup yaitu tahap evaluasi atau penilaian.

Proses pembelajaran ini akan berlangsung dengan sukses apabila perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran dilakukan dengan baik. Pembuatan Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik akan membuat guru tidak kesulitan mencapai atau melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut meliputi tiga jenis kegiatan administrasi yaitu :

- a. Pembagian tugas mengajar
- b. Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler
- c. Pembagian tugas bimbingan belajar

Pembagian tugas ini dilakukan melalui musyawarah guru yang dipimpin kepala sekolah. Keputusan tugas tersebut selanjudnya dituangkan dalam jadwal pelajaran untuk satu semester atau satu tahun akademik.

\*Catatan :

#### Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik dalam mencari dan menghimpun informasi, menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga peserta didik aktif, mendorong peserta didik mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan laboratorium.

#### Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru mendorong peserta didik membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat, untuk lebih mendalami sesuatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis, menguji prediksi atau hipotesis, menyimpulkan bersama, dan menyusun laporan atau tulisan, menyajikan hasil belajar.

#### Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik terhadap apa yang dihasilkan peserta didik melalui pengalaman belajar, memberikan apresiasi terhadap kekuatan dan kelemahan hasil belajar dengan menggunakan teori yang dikuasai guru, menambah informasi yang seharusnya dikuasai peserta didik, mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan lebih lanjut dari sumber yang terpercaya untuk lebih menguatkan penguasaan kompetensi belajar agar lebih bermakna. Setelah memperoleh keyakinan, maka peserta didik mengerjakan tugas-tugas untuk menghasilkan produk belajar yang kongkrit dan kontekstual. Guru membantu peserta didik menyelesaikan masalah dan menerapkan ilmu dalam aktivitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## **MATERI 7**

### **MANAJEMEN PEMANTAUAN KURIKULUM**

Pemantauan kurikulum merupakan salah satu fungsi manajemen, kurikulum merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang manager mulai dari tingkat sistem pendidikan nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam lingkup pendidikan baik formal maupun nonformal (Hamalik, 2006 : 217).

Tahap pemantauan kurikulum yakni persiapan, pelaksanaan kurikulum, sampai pada tahap akhir. Proses pemantauan yang berkesinambungan dapat mengatasi berbagai faktor-faktor penghambat yang muncul. Penilaian kurikulum juga harus dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian kurikulum ini penting untuk meningkatkan mutu pendidikan (Hamalik, 2006 : 217).

Kegiatan pemantauan dan kegiatan penilaian sebenarnya saling berkaitan. Pemantauan kurikulum memberikan bahan masukan untuk pelaksanaan penilaian kurikulum, sedangkan hasil penilaian juga merupakan masukan untuk perencanaan pemantauan selanjutnya, dan hasil dari kedua jenis kegiatan tersebut menjadi bahan bagi administrasi pelaksanaan , supervisi pelaksanaan, dan pengembangan serta perbaikan kurikulum selanjutnya (Hamalik, 2006 : 219).

#### **A. Konsep Sistem Pemantauan Kurikulum**

##### **1) Pengertian Pemantauan Kurikulum**

Sistem pemantauan kurikulum adalah suatu sistem pengumpulan data dan penerimaan informasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh pemantau kurikulum untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kurikulum.

Ciri-ciri pemantauan kurikulum adalah :

- a) Pemantauan berdasarkan multi indikator
- b) Pelaksanaan secara sangkil dan mungkus (Efektif dan Efisien)
- c) Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus di lapangan
- d) Pemantau adalah tenaga dan berpengalaman dalam bidangnya (Hamalik, 2006 : 220).

##### **2) Tujuan pemantauan kurikulum**

Tujuan pemantauan kurikulum secara umum adalah untuk mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam mengatasi pemantauan kurikulum.

Tujuan kurikulum secara khusus adalah

- a) Memberikan umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan

- b) Memberikan umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum
- c) Memberikan umpan balik bagi metode perencanaan
- d) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian kurikulum
- e) Memberikan bahan kajian untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan (Hamalik, 2006 : 220).

### **3) Sasaran yang Hendak dicapai**

- a) Persiapan pelaksanaan kurikulum yang meliputi lahan, sarana dan prasarana, tenaga, jadwal dan waktu, biaya, dan unsur penunjang lainnya.
- b) Pelaksanaan kurikulum yang terdiri dari program kegiatan, metode/prosedur, diklat, media pendidikan, bimbingan dan pelayanan, penilaian, permasalahan dan hambatan, sumber-sumber materi ajaran, serta penggunaan lainnya.
- c) Hasil pelaksanaan kurikulum atau hasil diklat, yang terdiri dari jumlah lulusan, kualitas lulusan, produktivitas dan dampak program pendidikan.
- d) Tindak lanjut pemanfaatan diklat, yang terdiri dari penempatan, penyebarluasan lulusan, bidang tugas lokasi, lembaga, Pembina atau pengawas, tempat tinggal, respon masyarakat dan lain-lain (Hamalik, 2006 : 220-221).

### **4) Aspek-aspek yang dipantau**

#### Indikator Input

- a. Target populasi
  - 1) Jenis sasaran yang telah dicapai
  - 2) Jumlah sasaran yang telah dicapai
  - 3) Kualitas yang telah dicapai
- b. Peserta didik
  - 1) Cara belajar (hasil tes formatif dan sumatif)
  - 2) Prestasi belajar (hasil tes formatif dan sumatif)
  - 3) Motivasi dan semangat belajar
  - 4) Keaktifan dan inisiatif
  - 5) Kepatuhan dan disiplin
  - 6) Kreativitas
  - 7) Produk benda yang dihasilkan
  - 8) Hambatan dan kesulitan yang dihadapi
- c. Tenaga pengajar
  - 1) Pelaksanaan tanggung jawab dan tugasnya
  - 2) Kualifikasi dan identifikasi personal

- 3) Kemampuan kemasyarakatan
  - 4) Kemampuan kepribadian
  - 5) Kemampuan profesional
  - 6) Loyalitas terhadap atasan
- d. Media Pengajaran
- 1) Jenis media yang digunakan
  - 2) Cara penggunaan media
  - 3) Pengadaan media
  - 4) Pemeliharaan dan perawatan media
- e. Prosedur penilaian
- 1) Instrument masalah yang dihadapi peserta
  - 2) Pelaksanaan penilaian
  - 3) Pelaporan hasil penilaian
- f. Bimbingan kepada Peserta didik
- 1) Kategori masalah yang dihadapi peserta
  - 2) Alat pengumpul data
  - 3) Teknik bimbingan
  - 4) Pelaksanaan bimbingan

#### Indikator Output

- a. Jumlah lulusan yang meliputi kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia
- b. Kualitas kemampuan lulusan (Hamalik, 2006 : 221-222).

#### **5) Program Kegiatan Pemantauan Kurikulum**

- a) Kegiatan pemantauan kurikulum adalah kegiatan pemantauan yang direncanakan sesuai dengan program pendidikan pada masing-masing kategori.
- b) Rencana pemantauan kurikulum memuat hal-hal sebagai berikut : tujuan pemantauan, aspek-aspek kegiatan yang akan dipantau, metode pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, tenaga pemantauan, biaya dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan,
- c) Isi program pemantauan adalah kategori pemantauan, kriteria pembuatan keputusan, data atau informasi yang diperlukan, instrument pengumpul informasi, pengorganisasian informasi, teknik analisis informasi dan laporan (Hamalik, 2006 : 222).

## **B. Pelaksanaan Pemantauan Kurikulum**

Pelaksanaan pemantauan kurikulum dapat dilaksanakan dengan cara

- 1) Rutin : dengan mempelajari dan menelaah laporan-laporan tertulis yang telah diterima
- 2) Langsung : dengan cara mengirimkan petugas ke lembaga yang sedang melaksanakan kurikulum
- 3) Pertemuan atau melalui komunikasi (Hamalik, 2006 : 223).

### a) Pencatatan dan Pelaporan

1. Informasi yang diperoleh dalam proses pemantauan kurikulum harus dicatat secara lengkap dan teliti dalam buku pemantaun kurikulum.
2. Informasi yang diperoleh harus diorganisaasi dengan cermat dan diadakan kajian, secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Hasil kajian selanjutnya disusun dalam bentuk laporan tertulis
4. Laporan disampaikan kepada yang berwenang untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan (Hamalik, 2006 : 223).

### b) Hasil pemantauan kurikulum

Hasil pemantauan kurikulum dapat dimanfaatkan dalam bentuk

1. Bagi pemimpin, dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan kebijakan pendidikan selanjutnya
2. Bagi pengembangan kurikulum, dapat digunakan sebagai bahan untuk usaha perbaikan kurikulum
3. Bagi pengawas dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada para pelaksana kurikulum sehingga terjadi penngkatan proses belajar mengajar.
4. Bagi pelaksana kurikulum, dapat digunakan sebagai bahan balikan untuk perbaikan prosedur dan penigkatan hasil selanjutnya (Hamalik, 2006 : 223).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## **MATERI 8**

### **MANAJEMEN PENILAIAN KURIKULUM**

Penilaian kurikulum merupakan salah satu fungsi manajemen, kurikulum merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang manager mulai dari tingkat sistem pendidikan nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam lingkup pendidikan baik formal maupun nonformal (Hamalik, 2006 : 217).

#### **a. Konsep Sistem Penilaian Kurikulum**

Sistem penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan :

- 1) Pertimbangan
- 2) Deskripsi objek penilaian
- 3) Kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan (Hamalik, 1992 : 211)

Penilaian kurikulum berfungsi :

- 1) Ejukatif, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar dalam proses pendidikan.
- 3) Diagnosis, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka perbaikan kurikulum.
- 4) Administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan pendidikan. (Hamalik, 1992 : 211 – 212)

Penilaian kurikulum bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang meliputi :

- 1) Keputusan tentang perencanaan kurikulum yang mengarah ke pencapaian tujuan umum dan tujuan khusus.
- 2) Keputusan tentang komponen masukan kurikulum.
- 3) Keputusan tentang implementasi kurikulum yang mengarahkan kegiatan – kegiatan pengajaran.
- 4) Keputusan tentang produk kurikulum yang menyangkut efek dan dampak program pendidikan. (Hamalik, 1992 : 212)

## **b. Sasaran penilaian kurikulum**

Sasaran penilaian kurikulum terdiri dari :

- 1) Proses pengembangan komponen – komponen kurikulum baik secara sendiri – sendiri maupun secara keseluruhan.
- 2) Aspek – aspek perencanaan tiap mata pelajaran dan paket – paket program pengajaran sesuai dengan kategorinya.
- 3) Pelaksanaan kurikulum di lingkungan pendidikan.
- 4) Pembinaan kurikulum pada tingkat pusat dan daerah sejalan dengan pendekatan dekonsentrasi.
- 5) Perbaikan kurikulum pada tingkat mata pelajaran dan paket program pendidikan.  
(Hamalik, 1992 : 212)

## **c. Asas – asas penilaian kurikulum**

Asas – asas penilaian kurikulum terdiri dari kategori masukan dan kategori proses.

Kategori masukan meliputi :

- 1) Ketercapaian target kurikulum yang telah ditentukan.
- 2) Kemampuan awal para peserta didik program pendidikan.
- 3) Derajat kemampuan professional guru.
- 4) Kuantitas dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan.
- 5) Jumlah dan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk kegiatan – kegiatan kurikuler.
- 6) Penyediaan dan pemanfaatan sumber informasi bagi pelaksanaan kurikulum.

## **d. Kategori proses**

Kategori proses meliputi :

- 1) Koherensi antara unsur – unsur dalam program pengajaran.
- 2) Kedayagunaan dan keterlaksanaan program program pengajaran dalam proses belajar mengajar.
- 3) Perumusan isi kurikulum.
- 4) Pemilihan dan penggunaan strategi belajar mengajar dan media pengajaran.
- 5) Pengorganisasian kurikulum.
- 6) Prosedur evaluasi.
- 7) Bimbingan, penyuluhan, dan pengajaran. (Hamalik, 1992 : 213).

#### **d. Program Penilaian Kurikulum**

Program penilaian merupakan serangkaian tindakan yang akan dilaksanakan dalam rangka penilaian kurikulum. Program ini penting sebagai alat pengelola dan evaluator dalam menyelenggarakan penilaian kurikulum. Program penilaian kurikulum memuat :

- 1) Penentuan tujuan program penilaian
- 2) Penilaian terhadap instrument penilaian
- 3) Pengadministrasian instrument penilaian
- 4) Pengelolaan data
- 5) Penganalisan penafsiran
- 6) Pendayagunaan hasil penilaian
- 7) Penilaian untuk menetapkan keberhasilan program
- 8) Pencatatan dan pelaporan. (Hamalik, 1992 : 221)

#### **e. Strategi penilaian kurikulum**

Strategi penilaian kurikulum antara lain :

- 1) Strategi penilaian kebutuhan dan kelayakan  
Strategi ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka penyusunan perencanaan kurikulum.
- 2) Strategi penilaian masukan  
Strategi ini bertujuan untuk mengenali dan menilai sumber-sumber yang tersedia dalam rangka penyusunan program pengajaran tentang ketenagaan, kemudahan, biaya, waktu yang diperlukan.
- 3) Strategi penilaian proses  
Strategi ini bertujuan untuk pelaksanaan kurikulum dan meramalkan hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program pengajaran.
- 4) Strategi penilaian produk  
Strategi ini bertujuan untuk menentukan tingkat efektifitas dan hasil kurikulum dengan cara menafsirkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh program pengajaran. (Hamalik, 1992 : 222 - 224)

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

## **MATERI 9**

### **TELAAH KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

#### **A. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat (15) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah “kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.” KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah (Muslich 2007, hlm. 17).

Kurikulum tersebut telah diberlakukan secara berangsur-angsur mulai tahun pelajaran 2006/2007, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan definisi tersebut, maka pihak sekolah diberikan kewenangan penuh untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum. Implementasi KTSP menuntut kemampuan sekolah dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum, karena masing-masing sekolah lebih mengetahui tentang kondisi satuan pendidikannya.

Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya komponen-komponen pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan, di antaranya adalah tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, alat alat pendidikan, kurikulum dan fasilitas yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

#### **B. Landasan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK). KTSP diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar dan telah disahkan penggunaannya di sekolah, baik negeri maupun swasta, yang diberlakukan secara bertahap pada tahun pelajaran 2006/2007, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah pusat (Depdiknas) mengharapkan paling lambat tahun pelajaran 2009/2010, semua sekolah telah menerapkan KTSP (Mulyasa 2006, hlm. 1-2). KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Muslich 2008, hlm. 1).

Dalam penyusunannya, KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, dan berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Landasan penyusunan KTSP sekurang-kurangnya menunjukkan

- (1) Adanya undang-undang yang jelas sebagai acuan dalam penyusunan KTSP;
- (2) Adanya PP dan Permendiknas yang dijadikan acuan dalam penyusunan KTSP;
- (3) Khusus untuk madrasah, adanya Surat Keputusan/Edaran Dirjen Pendidikan Islam atau Direktur Pendidikan Madrasah yang dijadikan acuan dalam penyusunan KTSP; dan
- (4) adanya rencana pengembangan sekolah/madrasah yang dijadikan acuan dalam penyusunan KTSP (Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo 2008, hlm. 46). Berikut ini akan dikemukakan landasan penyusunan KTSP adalah
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan di dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan di dalam PP No. 19 Tahun 2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); dan Pasal 20.
  - c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Dengan adanya landasan penyusunan KTSP berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri pendidikan nasional menjadi landasan yang sangat kuat dalam mengelola penyelenggaraan otonomi pendidikan di sekolah. Kebijakan otonomi pendidikan ini merupakan suatu keniscayaan dan harus diimplementasikan pada tataran praktis, tidak hanya sebuah wacana semata-mata.

Kebijakan desentralisasi pendidikan akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh stakeholders dan anggota masyarakat yang sangat peduli dengan urgensi pendidikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Pada KTSP, kewenangan tingkat satuan pendidikan atau sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum lebih diperbesar.

### **C. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memungkinkan berkurangnya materi pembelajaran yang banyak dan padat, tersusunnya perangkat standar dan patokan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik, berkurangnya beban tugas guru yang selama ini sangat banyak dan beban belajar siswa yang selama ini sangat berat, serta terbukanya kesempatan bagi sekolah untuk mengembangkan kemandirian sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah.

Sebagai sebuah konsep dan program, KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Dalam KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri;
- (2) KTSP berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman;
- (3) penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi;
- (4) sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif;
- (5) penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Kunandar 2007, hlm. 138).

Dalam KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok pelajaran, disesuaikan dengan situasi daerah dan minat peserta didik. Dalam KBK 2004 dideskripsikan kompetensi dasar, dijabarkan indikator, dan bahkan dipetakan pula materi pokok pelajaran. Oleh karena itu,

dalam mengimplementasikan KTSP di sekolah (kepala sekolah dan guru) diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum dengan tetap memperhatikan karakteristik KTSP, karena masing-masing sekolah dipandang lebih tahu tentang kondisi satuan pendidikannya. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kurikulum di sekolah sangat bergantung pada kepala sekolah dan guru, karena dua figur tersebut merupakan kunci yang menentukan dan menggerakkan berbagai komponen di lingkungan sekolah. Setiap sekolah dapat mengelola dan mengembangkan berbagai potensinya secara optimal dalam kaitannya dengan implementasi KTSP.

#### **D. Komponen dan Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

##### **1. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang disebut sebagai komponen kurikulum. Komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mendukung yang merupakan dasar utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), KTSP ada empat komponen, yaitu (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan KTSP, (3) kalender pendidikan, dan (4) silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP (dikutip dari panduan penyusunan KTSP lengkap 2008, hlm. 148-151).

Dengan adanya keempat komponen KTSP tersebut, maka tingkat satuan pendidikan atau sekolah, seperti kepala sekolah dan guru diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolahnya berdasarkan visi, misi dan tujuan sekolah. Karena masing-masing sekolah dipandang lebih mengetahui tentang kondisi nyata satuan pendidikannya.

##### **2. Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## **E. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Kurikulum merupakan salah satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan dan harus dikelola secara baik dan profesional. Pengembangan KTSP berdasarkan prinsip bahwa sebaiknya dilakukan secara terus-menerus untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan dan tuntutan zaman.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah

- a. prinsip relevansi, yaitu kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang;
- b. prinsip efektivitas, yaitu sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan;
- c. prinsip efisiensi, yaitu dengan modal atau biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-sekecilnya akan dicapai hasil yang memuaskan;
- d. prinsip kesinambungan, yaitu saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi;
- e. prinsip fleksibilitas, yaitu tidak kaku dan adanya ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak;
- f. prinsip berorientasi tujuan, yaitu sebelum bahan ditentukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu sehingga dapat menentukan secara tepat metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi;
- g. prinsip dan model pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus dengan implikasi bahwa kurikulum senantiasa mengalami revisi dan bersifat dinamis (Idi 2007, hlm. 179-183).

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut merupakan dasar pokok untuk mengkaji pembelajaran dan pengembangan kurikulum lebih lanjut. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti; bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif.

Khusus untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP telah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang

disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan propinsi dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. Pengembangan KTSP, antara lain menggunakan pendekatan KBK yang memiliki ciri-ciri:

- (1) menitikberatkan pencapaian target (attainment targets) kompetensi daripada penguasaan materi;
- (2) lebih mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia;
- (3) memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan (Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo 2008, hlm. 5-6).

Menurut Rusman (2009, hlm. 474 - 475), prinsip-prinsip pengembangan KTSP adalah

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan KTSP di atas pada praktek pengajaran di dalam kelas sangat tergantung pada situasi dan kondisi peserta didik di sekolah sehingga setiap guru memiliki kebebasan untuk menentukan materi pelajaran (standar kompetensi dan kompetensi dasar), indikator, metode, media, dan ketercapaiannya. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kalau terjadi perubahan kurikulum hendaknya terjadi perubahan secara menyeluruh termasuk materi, metode, guru, sarana, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan proses pembelajaran sehingga dampak positif dari perubahan kurikulum akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

## **F. Keunggulan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Untuk melihat keunggulan atau kelebihan KTSP dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya perlu dicari bahan pembandingan. Karena sesuatu dianggap lebih baik kalau dapat dibandingkan dengan sesuatu yang lain untuk menunjukkan keunggulannya. Oleh karena

itu, kita perlu mengetahui kelebihan dan kelemahan KTSP terlebih dahulu, kemudian baru kita mengetahui perbedaan antara KTSP dan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Misalnya antara KTSP dan KBK 2004 atau KTSP dan kurikulum 1994.

Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung kepada situasi dan kondisi, di mana kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut Fasli Jalal (dalam Imam Hanafie 2008, hlm. 1-5), kelebihan yang dimiliki KTSP adalah

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan.
3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.
4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20 %.
5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Sementara beberapa kelemahan dalam KTSP maupun penerapannya, antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.
2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari
3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsep penyusunan maupun prakteknya di lapangan.
4. Penerapan KTSP merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru.

Beberapa kelebihan KTSP tersebut merupakan faktor pendukung bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Sedangkan faktor kelemahannya merupakan faktor penghambat yang harus diantisipasi dan diatasi oleh pihak sekolah dan juga menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita.

Dengan demikian, ide dasar KTSP adalah mengembangkan pendidikan demokratis dan non monopolistik dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum, karena masing-masing sekolah dipandang lebih tahu tentang kondisi satuan pendidikannya. Oleh karena itu, perbedaan esensial antara KTSP dan KBK tidak ada. Keduanya sama-sama seperangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta didik (Muslich 2007, hlm. 17).

Perbedaannya hanya menampak pada teknis pelaksanaan. Jika KBK disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas (c.q. Puskur). Sedangkan KTSP disusun oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing, dalam hal ini sekolah yang bersangkutan, walaupun masih tetap mengacu pada rambu-rambu nasional Panduan Penyusunan KTSP yang disusun oleh badan independen yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Nama KTSP dan KBK sama-sama menggunakan kata kurikulum. KTSP adalah suatu dokumen yang memuat rencana penyelenggaraan dan pengembangan sekolah, sedangkan KBK adalah kurikulum dalam arti yang sebenarnya yang diwadahi oleh KTSP (Susanto 2008, hlm. 11).

Untuk perbedaan antara Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 1994 minimal ada aspek perbedaan yang mendasar (Susilo 2008, hlm. 102), yaitu :

pertama, aspek kewenangan pengembangan. Kurikulum 1994, seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat, dan daerah hanya kebagian pengembangan kurikulum lokal dengan porsi 80 % pusat dan 20 % daerah. Kurikulum 2006, pemerintah pusat hanya mengembangkan kompetensi sebagai standar, sedangkan elaborasi kompetensi diserahkan daerah/sekolah dalam bentuk silabus.

Kedua, penataan isi/konten (struktur program). Kurikulum 1994, tidak terjadi penataan materi, jam belajar, dan struktur program. Kurikulum 2006, terjadi penataan materi, jam belajar, dan struktur program.

KTSP merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mencapai keunggulan masyarakat dan bangsa dalam penguasaan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. KTSP diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan sekarang ini terutama dalam memasuki era globalisasi.

## **G. Langkah-Langkah Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

Implementasi KTSP bermuara pada pelaksanaan pembelajaran, yakni bagaimana agar isi atau pesan pesan kurikulum (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dapat diterima oleh peserta didik secara tepat dan optimal. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi, dan penutup. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan awal yang harus dilakukan guru untuk memulai atau membuka pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal agar memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar.

Kegiatan inti dalam proses pembelajaran merupakan tahapan kegiatan pembelajaran yang paling utama untuk pembentukan kompetensi peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas. Pembentukan kompetensi peserta didik merupakan kegiatan inti pembelajaran, antara lain mencakup penyampaian informasi tentang materi pokok dan membahas materi pokok untuk membentuk kompetensi peserta didik. Pembentukan kompetensi peserta didik perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Kegiatan penutup adalah kegiatan mengakhiri materi pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran perlu dilakukan secara profesional agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan menimbulkan kesan yang menyenangkan (Mulyasa 2008, hlm. 180-187).

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa kurikulum dalam dimensi kegiatan adalah sebagai manifestasi dari upaya untuk mewujudkan kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual dalam bentuk serangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah. Implementasi KTSP memberikan pemahaman tentang situasi dan kondisi sekolah, sasaran implementasi yang efektif dan efisien, serta harapan sekolah terhadap kurikulum yang diimplementasikan.

Ada dua hal pokok yang perlu disiapkan oleh pihak sekolah, yaitu kesiapan materil (sumber daya alamiah sekolah) dan non materil (sumber daya manusia sekolah). Bentuk kesiapan materil sekolah dapat dilihat dari dimensi perangkat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, keuangan, dan lingkungan sekolah yang mencakup lingkungan fisik (gedung) dan lingkungan sosial.

Sedangkan bentuk kesiapan non materil sekolah dapat dilihat dari dimensi kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua (Susilo 2008, hlm. 180-191). Hal senada dikemukakan oleh Rahman (2009, hlm. 202-205), banyak komponen yang berpengaruh terhadap kegagalan atau keberhasilan pendidikan, antara lain (1) kepala sekolah; (2) guru; (3) kurikulum; (4) sarana pendidikan; (5) sistem penerapan pendidikan; dan (6) suasana sosial dan lingkungan sekolah.

Sejalan dengan uraian di atas, Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo (2008, hlm. 37-38) mengemukakan tingkat kesiapan sekolah dalam pengembangan KTSP. Untuk menjawab persoalan ini perlu melihat kondisi nyata sekolah dalam membangun kemampuannya (capacity building), yang secara sederhana dapat dipetakan ke dalam beberapa tahap berikut ini:

1. Tahap Pra-formal, yakni sekolah yang belum memenuhi standar teknis, atau belum dapat memiliki sumber-sumber pendidikan (guru, sarana dan prasarana

pendidikan, dan sebagainya) yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara minimal.

2. Tahap Formalitas, yakni sekolah yang sudah memiliki sumber-sumber pendidikan yang memadai secara minimal atau mencapai standar teknis minimal, seperti jumlah dan kualifikasi guru, jumlah dan kualitas ruang kelas, jumlah dan kualitas buku pelajaran, dan jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan lainnya.
3. Tahap Transisional, yakni sekolah yang sudah mampu memberikan pelayanan minimal pendidikan bermutu, seperti kemampuan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal, meningkatnya kreativitas guru, pendayagunaan perpustakaan secara optimal, kemampuan menambah anggaran dan dukungan fasilitas pendidikan dari sumber masyarakat, dan lain-lain.
4. Tahap Otonomi, yakni sekolah yang berada pada tahap penyelesaian capacity building menuju profesionalisasi dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Strategi membangun kemampuan (capacity building) yang bisa dilakukan agar layak atau semakin layak untuk mengembangkan KTSP, antara lain:
  1. Terhadap sekolah tahap pra-formal, strategi capacity building dilakukan melalui upaya melengkapi sumber-sumber pendidikan dengan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan secara minimal, tetapi memadai untuk dapat mencapai tahap perkembangan berikutnya.
  2. Terhadap sekolah yang sudah mencapai tahap formalitas, strategi capacity building dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan tenaga kependidikan, seperti kepala sekolah agar mampu mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal dengan tanpa banyak pemborosan. Bagi tenaga pengajar dikembangkan kemampuan untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran secara kreatif dan inovatif, serta dapat melakukan penelitian terhadap pendekatan pembelajaran yang paling efektif.
  3. Terhadap sekolah yang sudah mencapai tahap transisional, perlu dikembangkan system manajemen berbasis sekolah yang didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta mekanisme akuntabilitas pendidikan melalui fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  4. Terhadap sekolah yang sudah mencapai tahap otonomi perlu ditingkatkan pengembangannya secara optimal dan menyeluruh yang mencakup seluruh komponen pendidikan yang ada di dalamnya, sehingga dapat dikembangkan ke arah sekolah nasional yang berstandar internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Imam. Plus Minus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). (Online)  
Available: [Http://www.mahaniv@yahoo.com](http://www.mahaniv@yahoo.com) (26 Juli 2008)
- Idi, Abdullah 2007. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Ar-Ruzz, Yogyakarta
- Kunandar 2007. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muslich, Masnur 2007. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual (Panduan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah). Bumi Aksara, Jakarta
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo 2008. Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah & Madrasah. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyasa, E. 2006. Kurikulum yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Remaja Rosdakarya, Bandung
- 2008. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah. Bumi Aksara, Jakarta
- Rusman 2009. Manajemen Kurikulum. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sosilo, Muhammad Joko 2008. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Susanto 2006. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Asa Mandiri, Jakarta